



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 10
Tahun Sidang : 2021-2021
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-3
Dengan : 1. Menteri Keuangan RI
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
3. Menteri Dalam Negeri RI
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas
5. DPD RI

Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 20 September 2021
Waktu : Pukul 12.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : 1. Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 (hadir fisik)
2. Virtual/Video Conference

Ketua Rapat : **H. DITO GANINDUTO, MBA**
(Ketua Komisi XI DPR RI)

Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)

Acara : Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang HKPD) kepada Pemerintah.

Hadir : 1. ... orang dari 54 orang Anggota Komisi XI DPR RI;
2. **SRI MULYANI INDRAWATI** (Menteri Keuangan) beserta jajarannya;
3. **BENNY RIYANTO** (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM) beserta jajarannya;
4. **AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI** (Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas) beserta jajarannya;

5. **MOCHAMAD ARDIAN N.** (Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri) beserta jajarannya;
6. **SUKIRYANTO (Ketua Komite IV DPD RI)**
7. **DARMANSYAH HUSEIN** (Anggota Komite IV DPD RI);
8. **CASYTHA A. KATHMANDU** (Anggota Komite IV DPD RI);
9. **ABDUL HAKIM** (Anggota Komite IV DPD RI).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan DPD RI dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI dan rapat dilakukan dengan kehadiran secara fisik dan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 12.15 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan DPD RI diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Penyerahan DIM RUU tentang HKPD dari Fraksi-fraksi dan DIM RUU tentang HKPD dari DPD RI. dan Pandangan DPD RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI dan DPD RI menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang HKPD) kepada Pemerintah untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pembahasan Rapat Panja.

III. PENUTUP

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan DPD RI ditutup pada pukul 12.25 WIB.

Jakarta, 20 September 2021

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



H. DITO GANINDUTO, MBA